

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SEMARANG TIMUR**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Reyka Saraswati Putri
12030214060022

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA : REYKA SARASWATI PUTRI
NIM : 12030214060022
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : TINJAUAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SEMARANG TIMUR

Semarang, 26 Mei 2017

Dosen Pembimbing



Dr. Nugroho SBM., MSP
NIP 19610506 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan baik dan lancar. Judul yang diambil dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah **Tinjauan Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur**. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik guna meraih gelar Ahli Madya (A.md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Dul Muid, S.E., M.Si. Akt., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan dosen wali yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Nugroho SBM, MSP. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan wawasan, motivasi dan bimbingan dengan sabar sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kepada keluarga, Bapak dan Ibu serta adik – adik yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT.
5. Bapak Akhmad Noorwakhid, S.E., MM. selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik.

6. Bapak Abdul Malik, S.E., MM. selaku pembimbing lapangan yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik.
7. Bapak Aris Wikananto, S.E., MM. selaku Kepala Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.
8. Seluruh staff di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur yang telah membantu dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik.
9. Sahabat – sahabat penulis, Nanung dan Alfin yang selalu memberi semangat kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan, khususnya Angkatan 2014, terimakasih atas kebersamaannya selama tiga tahun di bangku perkuliahan.
11. Serta berbagai pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis merasa bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik serta saran yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis agar lebih baik kedepannya.

Semarang, 26 Mei 2017

Penulis,

Reyka Saraswati Putri

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Ruang Lingkup Pembahasan | 2 |
| 1.3 | Tujuan dan Kegunaan Penulisan | 3 |
| | 1.3.1 Tujuan Penulisan | 3 |
| | 1.3.2 Kegunaan Penulisan | 4 |
| 1.4 | Cara Pengumpulan Data | 4 |
| | 1.4.1 Data Penelitian | 4 |
| | 1.4.2 Metode Pengumpulan Data | 5 |
| 1.5 | Sistematika Penulisan | 6 |

BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur | 7 |
| 2.2 | Visi, Misi, dan Motto KPP Pratama Semarang Timur | 8 |
| 2.3 | Nilai-Nilai Pelayanan KPP Pratama Semarang Timur | 9 |
| 2.4 | Tugas Pokok dan Fungsi Utama KPP Pratama Semarang Timur | 10 |
| 2.5 | Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Timur | 11 |
| 2.6 | Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Timur | 12 |

| | | |
|-----|---|----|
| 2.7 | Keadaan Personalia KPP Pratama Semarang Timur | 13 |
| 2.8 | Deskripsi Jabatan | 14 |

BAB III PEMBAHASAN

| | | |
|-------|---|----|
| 3.1 | Perpajakan Secara Umum | 21 |
| 3.1.1 | Pengertian Pajak | 21 |
| 3.1.2 | Fungsi Pajak | 21 |
| 3.1.3 | Asas Pengenaan Pajak | 22 |
| 3.1.4 | Sistem Pemungutan Pajak | 23 |
| 3.2 | Penagihan Pajak | 24 |
| 3.2.1 | Dasar Penagihan Pajak | 24 |
| 3.2.2 | Dasar Penagihan Pajak | 24 |
| 3.2.3 | Tindakan Penagihan Pajak | 25 |
| 3.3 | Penagihan Pajak dengan Surat Paksa | 30 |
| 3.3.1 | UU Penagihan Pajak dengan Surat Pajak (PPSP) | 30 |
| 3.3.2 | Penerbitan Surat Paksa | 31 |
| 3.3.3 | Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa | 32 |
| 3.4 | Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Piutang Pajak | 33 |
| 3.5 | Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur | 35 |

BAB IV PENUTUP

| | | |
|-----|------------------|----|
| 4.1 | Kesimpulan | 37 |
| 4.2 | Saran | 38 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 39 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Timur | 11 |
| Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan | 13 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan | 14 |
| Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 14 |
| Tabel 3.1 Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Efektivitas Pencairan Piutang Pajak | 33 |
| Tabel 3.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Tingkat Penerimaan Pajak | 35 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Timur | 12 |
| Gambar 3.1 Alur dan jangka Waktu Penagihan Pajak | 29 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tagihan Pajak PPh
- Lampiran 2 : Surat Tagihan Pajak PPN
- Lampiran 3 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh
- Lampiran 4 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN
- Lampiran 4 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPh Pasal
- Lampiran 5 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPh
- Lampiran 6 : Surat Teguran
- Lampiran 7 : Surat Paksa
- Lampiran 8 : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
- Lampiran 9 : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- Lampiran 10 : Berita Acara Pelaksanaan Sita

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang makmur serta memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut tertuang pada alinea kedua dan keempat. Oleh karena tujuan tersebut, maka perlu diadakan pembangunan nasional. Untuk mencapai pembangunan nasional tersebut diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peranan yang besar dalam kegiatan pendanaan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus ditingkatkan agar penerimaan negara tiap tahun semakin bertambah. Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:1), pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut Pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Masyarakat sebagai warga negara diharapkan memiliki kesadaran sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Seiring diadakannya reformasi perpajakan, sistem perpajakan Indonesia diubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Pada sistem *official assessment*, petugas pajak bersifat aktif dan Wajib Pajak bersifat pasif. Sedangkan dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak yang dituntut untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar tiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem yang baru, Wajib Pajak diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kondisi seperti ini membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya.

Dalam pelaksanaan perundang-undangan perpajakan sering terdapat penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Penyimpangan yang berupa pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut yang menyebabkan tunggakan pajak kian meningkat.

Oleh sebab itu harus dilakukan tindakan penagihan yang bersifat memaksa. Salah satu wujud tindakan penagihan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah dengan diterbitkan dan disampaikannya Surat Paksa yang memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Namun dalam pelaksanaan penagihan Surat Paksa tersebut tidak semua mendapat tanggapan positif dari Wajib Pajak berupa pelunasan utang pajak dan biaya penagihannya.

Pemerintah menaruh harapan agar pajak dapat menjadi sumber pendapatan terbesar yang berkontribusi dalam pembangunan nasional. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka Tugas Akhir mengambil judul **TINJAUAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR.**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pembahasan mengenai judul yang telah dipilih dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya. sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Ruang lingkup pembahasan masalah dapat dirumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian meliputi:

1. Perpajakan Secara Umum.

2. Penagihan Pajak dan Tindakan Penagihan.
3. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa.
5. Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Piutang Pajak.
6. Kontribusi Penagihan dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup penulisan, tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk membandingkan antara teori dan praktik yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur dalam penerapan tata cara penagihan dengan Surat Paksa.
5. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur dalam menghadapi permasalahan dalam kegiatan penagihan pajak.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.
2. Bagi Program Diploma III, penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi dalam bidang perpajakan serta menjadi dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.
3. Bagi Pihak Lain, penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang tinjauan efektivitas penagihan pajak khususnya dengan Surat Paksa dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir maupun penelitian di bidang yang sama.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Data Penelitian

Data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Santosa (2007:12), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri. Data primer yang diperoleh peneliti berasal langsung dari objeknya. Data tersebut didapat melalui observasi pada seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

2. Data Sekunder

Menurut Santosa (2007:13), data sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang dapat diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Data tersebut dapat diperoleh melalui studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan adalah arsip dan dokumen yang berhubungan dengan penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. Raco (2010:112) mengemukakan bahwa “observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan”. Observasi yang dilakukan adalah dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari objek yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Metode Wawancara

Menurut Gulo (2011:119), wawancara dilakukan dengan hubungan langsung atau bentuk tatap muka antara pewawancara dan responden, mengajukan pertanyaan, meminta tanggapan, dan melaporkan tanggapan secara tertulis. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pegawai pada seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur terkait dengan penagihan dengan Surat Paksa dengan melakukan tanya jawab atau dialog langsung.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan (Sugiyono, 2013:240). Dalam metode ini, data

dikumpulkan dengan membaca dan mempelajari literatur dan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan Tugas Akhir ini, maka sistematika yang digunakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

Berisi tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur yang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, lokasi dan wilayah kerja, struktur organisasi, serta tugas pokok di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisi tentang pembahasan tentang ruang lingkup penulisan. Pembahasan dilakukan dengan menyajikan teori yang didapat selama kegiatan perkuliahan dan bagaimana praktik yang terjadi mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan yang telah diuraikan dalam pembahasan yang terkait dengan topik Tugas Akhir yang ditulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

Reformasi Birokrasi di tubuh Direktorat Jendral Pajak yang bergulir sejak tahun 2002 membawa perubahan besar. Salah satunya adalah perubahan bentuk organisasi. Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidik Pajak melebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Direktorat Jendral Pajak menerapkan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan tata kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Pelayanan Pajak atau yang disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam

lingkup kerja Direktorat Jenderal Pajak. KPP menampung pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH). Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, dan Retribusi ditampung oleh pemerintah daerah.

KPP Pratama Semarang Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I. KPP Pratama Semarang Timur menjalankan 2 (dua) fungsi, yaitu :

- a. Fungsi *Budgeter*, menghimpun penerimaan negara.
- b. Fungsi Pengaturan atau *Regulated*, melalui kebijakan-kebijakan perpajakan.

KPP Pratama Semarang Timur terbentuk pada tanggal 6 November 2007 yang berlokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.34 Semarang - 50136, telepon (024) 8414787 dan faximile (024) 8414439 dengan kode wilayah 504. Sejak terbentuk 6 November 2007, KPP Pratama Semarang Timur siap memberikan pelayanan, penyuluhan, serta melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam rangka memenuhi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur didukung dengan adanya Ruang Pelayanan yang nyaman dan luas, *Helpdesk* yang dalam hal ini para *Account Representative* (AR) yang selalu siap memberikan layanan kepada Wajib Pajak mengenai informasi yang berkaitan dengan perpajakan, Ruang Konsultasi, Ruang Rapat yang memiliki kapasitas 20 orang, Ruang Aula yang memiliki kapasitas 100 orang, layanan internet, dan Ruang *Nursery*.

2.2 Visi, Misi, dan Motto KPP Pratama Semarang Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur mempunyai Visi, Misi, dan Motto yaitu sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Indonesia.

b. Misi

Mengumpulkan penerimaan pajak yang dioptimalkan melalui :

1. Peningkatan Efektivitas Pelayanan dan Penyuluhan
2. Tertib Administrasi Perpajakan
3. Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan
4. Penegakan Hukum untuk menjamin Kepastian Hukum

c. Motto

“Pajak Menyatukan Hati, Membangun Negeri”

2.3 Nilai-Nilai Pelayanan KPP Pratama Semarang Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur sangat memegang teguh nilai-nilai pelayanan. Nilai-nilai yang diterapkan KPP Pratama Semarang Timur berpacu pada nilai-nilai Kementerian Keuangan karena Direktorat Jendral Pajak bernaung di bawah Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Integritas

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Integritas yang dimaksud berwujud kejujuran yang menjadi harga mati dalam mengemban tugas negara.

2. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab.

3. Sinergi

Membantu dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Sinergi ditugaskan sebagai salah satu kerjasama yang baik di Internal maupun dengan Eksternal, kerjasama yang baik berguna untuk memajukan bangsa dan negara.

4. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

5. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang baik. Kesempurnaan ditunjukkan dengan pembaharuan produk hukum dan standar kinerja menjadi lebih baik dan semakin baik yang selalu dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Utama KPP Pratama Semarang Timur

Kegiatan KPP Pratama Semarang Timur adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wilayah Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak fungsi KPP Pratama Semarang Timur adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, KPP Pratama Semarang Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak

- f. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- i. Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- k. Pembetulan ketetapan pajak
- l. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
- m. Pelaksanaan administrasi kantor

2.5 Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Timur

KPP Pratama Semarang Timur memiliki wilayah kerja 2 kecamatan meliputi Kecamatan Semarang Timur terdiri dari 11 kelurahan, dan Kecamatan Semarang Utara terdiri dari 8 kelurahan.

Tabel 2.1
Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Timur

| No. | Kecamatan Semarang Timur (meliputi Kelurahan) | Kecamatan Semarang Utara (meliputi Kelurahan) |
|-----|--|--|
| 1 | Bugangan | Bandarharjo |
| 2 | Karangtempel | Bulu Lor |
| 3 | Karangturi | Dadapsari |
| 4 | Kebonagung | Kuningan |
| 5 | Kemijen | Panggung Kidul |
| 6 | Mlatibaru | Panggung Lor |
| 7 | Mlatiharjo | Plombokan |
| 8 | Rejomulyo | Purwosari |
| 9 | Rejosari | Tanjungmas |
| 10 | Sarirejo | |

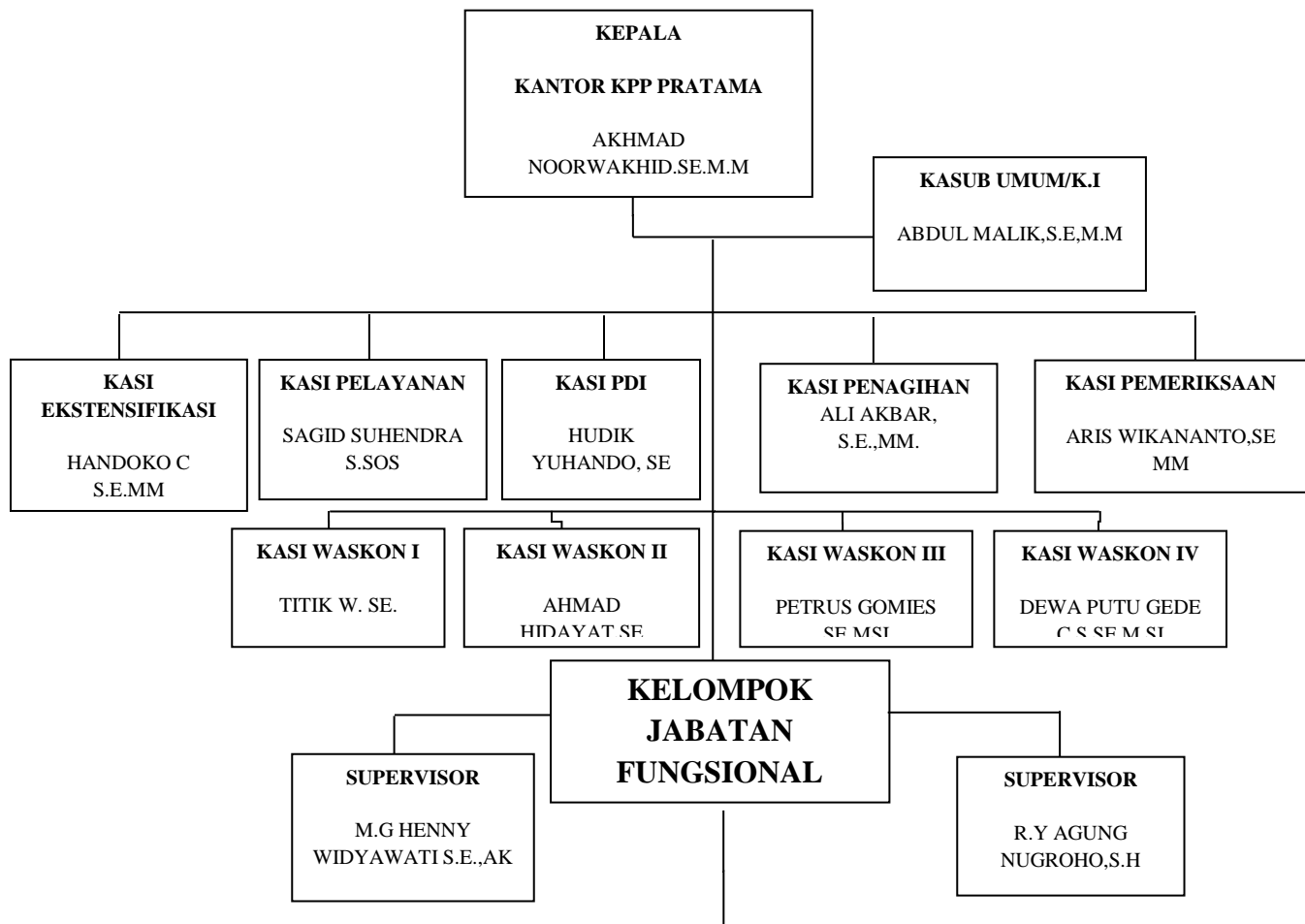
Sumber : Sub. Bag. Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

2.6 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Timur

Struktur organisasi adalah suatu kerangka skematis yang menggambarkan hubungan kerja sama tugas atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara berbagai individu seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kerja sama secara harmonis. Untuk menetapkan struktur organisasi yang tepat agar perusahaan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien tidaklah mudah. Maka dalam menetapkan struktur organisasi harus dipertimbangkan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan. Berikut adalah struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Timur



Gambar 2.1 (lanjutan)

Sumber : Sub. Bag. Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

2.7 Keadaan Personalia KPP Pratama Semarang Timur

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur per 31 September 2016 sebanyak 85 orang, dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan tingkatan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

| No. | Jabatan | Jumlah Pegawai |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Kepala Kantor | 1 |
| 2 | Kepala Seksi | 10 |
| 3 | Account Representative (AR) | 24 |
| 4 | Fungsional (Pemeriksa Pajak) | 9 |
| 5 | Supervisor | 2 |
| 6 | Juru Sita | 3 |
| 7 | Pelaksana | 39 |
| Jumlah | | 85 |

Sumber : Sub. Bag. Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Jumlah Pegawai |
|--------|--------------|----------------|
| 1 | Golongan I | - |
| 2 | Golongan II | 22 |
| 3 | Golongan III | 57 |
| 4 | Golongan IV | 6 |
| Jumlah | | 85 |

Sumber : Sub. Bag. Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|--------|--------------------|----------------|
| 1 | S-2 | 11 |
| 2 | S-1 | 46 |
| 3 | D-III | 10 |
| 4 | D-I | 12 |
| 5 | SMA | 6 |
| Jumlah | | 85 |

Sumber : Sub. Bag. Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

2.8 Deskripsi Jabatan

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak masing-masing seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Uraian tugas :

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategi Kantor Wilayah.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MOU) sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah.
- Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
- Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan penyusunan monografi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pemantaun pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM serta pembayaran PBB dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

b. Sub Bagian Umum

Uraian tugas :

- Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.
- Menyelenggarakan pengurusan surat-surat masuk atau berkas dokumen yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyelenggarakan penyusunan surat keluar agar komunikasi administrasi berjalan dengan lancar.
- Menyimpan surat dan dokumen untuk memudahkan penemuan kembali surat atau dokumen yang diperlukan.
- Membuat konsep rencana kerja subbagian umum.
- Menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan kenaikan pangkat pegawai golongan II/d kebawah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Membuat konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan calon peserta diklat.

Sub Bagian Umum terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Kepegawaian

Uraian tugas :

- Melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menatausahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan/penyusunan arsip dan dokumen serta membantu urusan lapangan.
- Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji/rapel, gaji/kekurangan gaji, dan mengupdate data daftar gaji berdasarkan mutasi kepegawaian.

- Membuat konsep Daftar Perencanaan Pembiayaan Kantor Pelayanan Pajak.
- Menyiapkan surat permintaan pembayaran/SSP sebagai uang persediaan (UP) atau UP tambahan.
- Menyiapkan SPPR-LS sebagai pembayaran langsung atas tagihan pihak ketiga.

2. Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

3. Bagian Rumah Tangga

Uraian tugas :

- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan, dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.
- Membuat konsep perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor/ATK/formulir sesuai dengan batas kewenangannya berdasarkan rencana anggaran dalam DIPA.
- Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian ATK.
- Mencatat dan memberi kode klasifikasi lokasi inventaris serta menyelenggarakan pembukuan inventaris kantor.
- Menyusun konsep kompilasi laporan barang inventaris kantor.
- Meneliti barang-barang inventaris kantor yang rusak dan tidak terpakai lagi serta membuat konsep daftar usulan penghapusan dan pemusnahannya.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Uraian tugas :

- Melakukan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data.

- Penyajian informasi perpajakan.
- Perekaman dokumen perpajakan.
- Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan.
- Pelayanan dukungan teknis komputer.
- Pemantauan *e-SPT* dan *e-Filing*.
- Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG.
- Penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Uraian tugas :

- Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.
- Mengkoordinasikan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
- Mengkoordinasikan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak.
- Membimbing bawahan pada Seksi Pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi pegawai.
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Seksi Pelayanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

e. Seksi Penagihan

Uraian tugas :

- Penatausahaan piutang pajak.
- Penundaan angsuran tunggakan pajak.
- Penagihan aktif.
- Usulan penghapusan piutang pajak.
- Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihihan dengan surat paksa.

f. Seksi Pemeriksaan

Uraian tugas :

- Penyusunan rencana pemeriksaan.
- Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi

Uraian tugas :

- Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
- Pendataan objek dan subjek pajak.
- Penilaian objek pajak.
- Kegiatan ekstensifikasi objek pajak.
- Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek dalam menunjang kinerja ekstensifikasi.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Di KPP Pratama Semarang Timur terdapat 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu :

- 1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 2) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

4) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Pada PMK-79/PMK-01/2015 tentang Account Representative (AR) pada KPP membuat pemisahan pada AR. Adapun tugas masing-masing AR yaitu sebagai berikut :

- 1) AR yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak (Waskon I) mempunyai tugas :
 - Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak.
 - Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak.
 - Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP.
 - Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan PBB.
- 2) AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak (Waskon II,III,IV) mempunyai tugas :
 - Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
 - Menyusun profit Wajib Pajak.
 - Menganalisis kinerja Wajib Pajak.
 - Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka Intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas :

- Pejabat fungsional pemeriksa : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.
- Pejabat fungsional penilai : Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perpajakan Secara Umum

3.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan: *“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*
2. Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Prof. Dr. Mardiasmo (2011:1): *“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”*

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) dalam buku “Perpajakan” (2009:1) ada 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3.1.3 Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangannya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas Domisili (*Residence Principle*). Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh luar negeri (*world-wide income concept*).
2. Asas Sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak tersebut diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan

yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Sebagai contoh, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas Kebangsaan (*Nationality/Citizenship Principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, sumber penghasilan yang akan dikenakan pajak tidak menjadi persoalan. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world-wide income*.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga:

1. Sistem *Official Assessment*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak. Pada sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan petugas pajak bersifat aktif dalam menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem *official assessment* adalah:
 - a. Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya.
 - c. Utang pajak timbul setelah adanya ketetapan dari pemerintah.
2. Sistem *Self Assessment*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem *self assessment* adalah:

- a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak berperan aktif dalam membayar dan melaporkan pajak terutang yang seharusnya dibayar.
 - c. Pemerintah bertugas mengawasi Wajib Pajak dan memberikan arahan dalam bentuk konsultasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Sistem *Withholding Tax*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga (bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut besar pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Keunggulan dari sistem ini adalah Wajib Pajak yang bersangkutan tidak perlu menghitung dan menyetorkan pajaknya karena telah dilakukan oleh pihak ketiga. Kekurangannya adalah pajak yang telah dipungut oleh pihak ketiga memiliki risiko tidak disetorkan ke kas negara.

3.2 Penagihan Pajak

3.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pajak untuk menegur Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak yang dimiliki. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak dilakukan sesuai prosedur dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum.

3.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan buku KUP, dasar penagihan pajak yaitu:

1. Pada Pasal 18 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa dasar penagihan pajak adalah:

- Surat Tagihan Pajak (STP)
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
2. Pada Pasal 12 UU PBB disebutkan bahwa dasar penagihan pajak adalah:
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - Surat Ketetapan Pajak
 - Surat Tagihan Pajak (STP)

3.2.3 Tindakan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dikelompokkan menjadi penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak fiskus berperan aktif dan diikuti dengan tindakan sita, serta dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Ada lima tahap yang bisa dilakukan juru sita pajak untuk melaksanakan penagihan pajak, yaitu:

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan juru sita pajak kepada Wajib Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Juru sita pajak akan melaksanakan penagihan utang pajak sebelum Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak jatuh tempo agar mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Sehingga apabila saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus Wajib Pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dasar hukum kegiatan penagihan seketika dan sekaligus adalah Pasal 20 UU KUP, Pasal 6 UU PPSP, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008.

2. Surat Teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan Pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak tersebut belum melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya Surat Teguran adalah untuk memberi peringatan kepada Wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa. Dasar hukum penerbitan Surat Teguran adalah Pasal 8 s.d 11 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008.

3. Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang sekaligus dengan biaya penagihan pajaknya. Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Surat Paksa diterbitkan apabila 21

(dua puluh satu) hari setelah jatuh tempo Surat Teguran Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat Paksa harus dilunasi dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam. Apabila Wajib Pajak tidak segera dilunasi dalam jangka waktu tersebut, maka Pejabat segera menerbitkan Surat Penyitaan. Dasar hukum penerbitan Surat Paksa adalah Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008.

4. Surat Sita

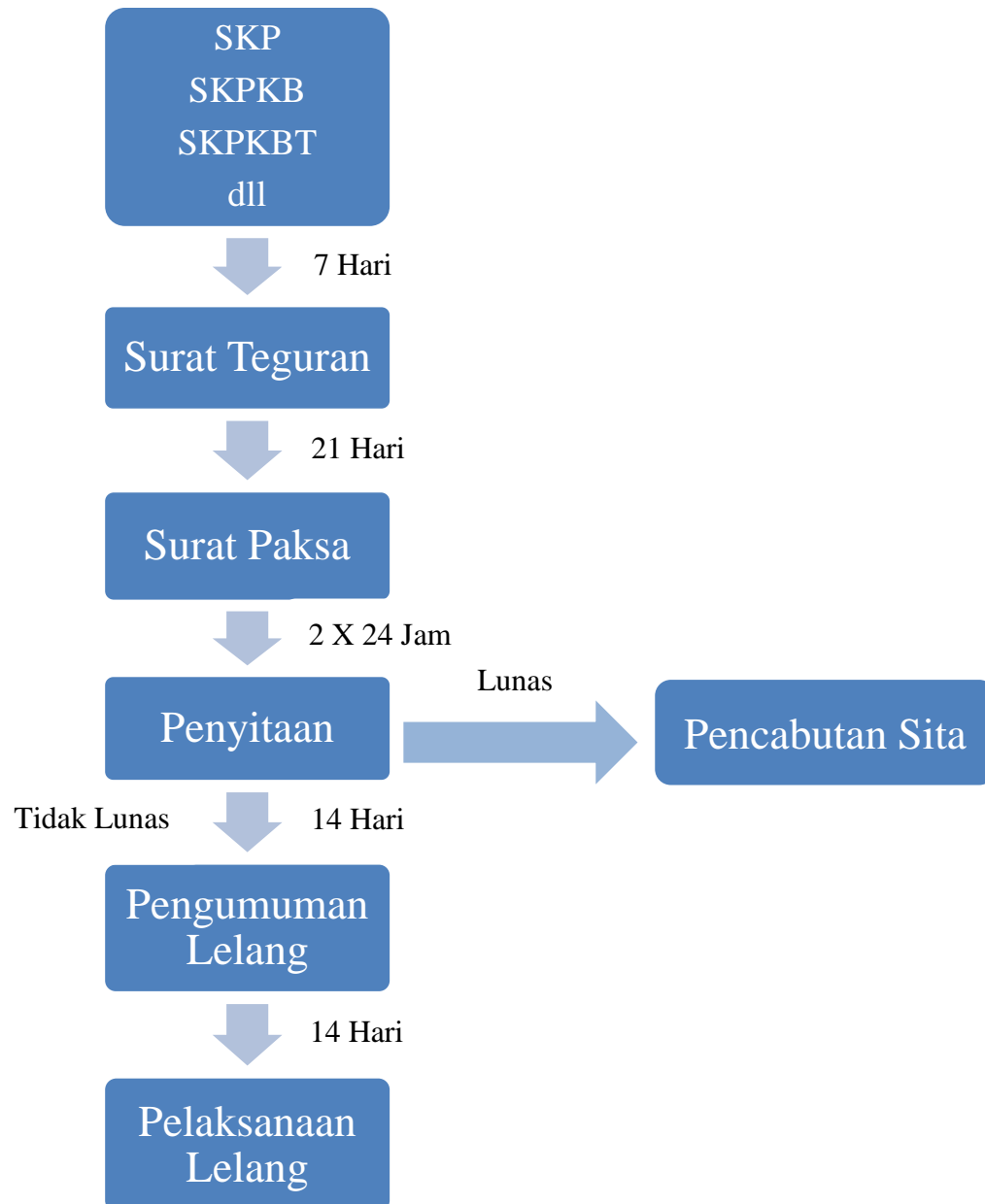
Surat sita adalah surat yang diterbitkan apabila dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam Wajib Pajak belum membayar utang pajak. Dalam penagihan pajak dengan Surat Sita, juru sita berhak melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Penyitaan hanya digunakan sebagai jaminan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Sehingga Wajib Pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan dilakukannya penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hal lainnya yang dapat disita diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pencabutan sita dilakukan jika Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Dasar hukum penerbitan Surat Sita adalah Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2000.

5. Lelang

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilakukan tindakan lelang. Dalam hal Wajib Pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan

pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam media massa dan biaya pada saat pelelangan. Jika Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Dasar hukum kegiatan lelang barang sitaan adalah Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008.

Gambar 3.1
Alur dan Jangka Waktu Penagihan Pajak



Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

3.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

3.3.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

1. Falsafah UU PPSP No. 19/2000
 - a. Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
 - b. Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - c. Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan.
2. Tujuan perubahan UU PPSP NO. 19/2000
 - a. Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
 - b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
 - c. Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *Law Enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
 - d. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal-hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No. 19/2000
 - a. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, dan surat lain sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
 - b. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
 - c. Mempertegas pengertian Wajib Pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, dan pemilik modal.

- d. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Wajib Pajak.
- e. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
- f. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas persentase tertentu dari hasil penjualan.
- g. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- i. Memperjelas hak Wajib Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan.
- j. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

3.3.2 Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan jika utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran, kecuali apabila Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus telah diterbitkan kepada Wajib Pajak maka Surat Paksa dapat segera diterbitkan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

3. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

3.3.3 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU PPSP bahwa Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Berdasarkan Pasal 10 UU PPSP, yaitu:

1. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
2. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada:
 - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3.4 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Piutang Pajak

Tingkat efektivitas penagihan pajak dapat diketahui dengan menghitung rasio efektivitas yaitu membandingkan realisasi penagihan pajak dengan Surat Paksa dengan potensi pencairan piutang pajak. Efektivitas penagihan dengan Surat Paksa dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penagihan}}{\text{Potensi Pencairan}} \times 100\%$$

dalam hal ini, realisasi penagihan adalah jumlah pencairan piutang pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah tindakan Surat Paksa, sedangkan potensi pencairan adalah jumlah piutang pajak yang seharusnya diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

Menurut Siagian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan menggunakan skala peringkat sebagai berikut:

1. < 69 : Tidak Efektif
2. 70 – 79 : Kurang Efektif
3. 80 – 89 : Cukup Efektif
4. > 100 : Efektif

Tabel 3.1 merupakan hasil perhitungan rasio tingkat efektivitas dengan menggunakan Surat Paksa.

Tabel 3.1
Tingkat Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Piutang Pajak

| Tahun | Realisasi Penagihan | Potensi Pencairan | Persentase |
|-------|---------------------|-------------------|------------|
| 2014 | 2.845.745.033 | 103.116.500.933 | 2,76 % |
| 2015 | 2.216.288.879 | 102.652.374.100 | 2,16 % |
| 2016 | 1.105.546.482 | 100.609.385.848 | 1,10 % |

Sumber : Seksi Penagihan, data diolah

Ditinjau dari segi nominalnya, potensi pencairan piutang pajak pada tahun 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur tercatat sebesar Rp103.116.500.933 dan realisasi penagihan piutang pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp2.845.745.033 atau sekitar 2,76 %. Dilihat dari indikator pengukuran tingkat efektifitas, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa tahun 2014 tergolong tidak efektif.

Tahun 2015 mengalami penurunan nominal potensi pencairan piutang pajak menjadi Rp102.652.374.100 dan realisasi penagihan piutang pajak sebesar Rp2.216.288.879 atau sekitar 2,16 %. Dilihat dari indikator pengukuran tingkat efektivitas, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa tahun 2015 tergolong tidak efektif.

Tahun 2016 mengalami penurunan nominal potensi pencairan piutang pajak menjadi Rp100.609.385.848 dan realisasi penagihan piutang pajak sebesar Rp1.105.546.482 atau sekitar 1,10 %. Dilihat dari indikator pengukuran tingkat efektivitas, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, sehingga hasil pengukuran efektivitas menjadi tidak efektif, antara lain:

1. Penanggung Pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
2. Penanggung Pajak lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Penanggung Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
4. Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus.
5. Penanggung Pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

Upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi hal-hal yang menyebabkan hasil pengukuran efektivitas menjadi tidak efektif, antara lain:

1. Dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
2. Diadakannya Kelas Pajak yang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.
3. Berusaha meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap masyarakat.

3.5 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

Keberhasilan seksi penagihan dapat diukur dengan melihat kemampuan seksi penagihan dalam meningkatkan penerimaan yang berasal dari penagihan pajak. Kontribusi penagihan pajak dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap realisasi penerimaan pajak. Kontribusi penagihan pajak dihitung dengan rasio kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penagihan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

dalam hal ini, realisasi penagihan adalah jumlah pencairan piutang pajak setelah tindakan Surat Paksa, sedangkan realisasi penerimaan adalah jumlah keseluruhan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Hasil perhitungan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak

| Tahun | Realisasi Penagihan | Realisasi Penerimaan | Persentase |
|-------|---------------------|----------------------|------------|
| 2014 | 2.845.745.033 | 306.017.380.662 | 0,93 % |

| | | | |
|------|---------------|-----------------|--------|
| 2015 | 2.216.288.879 | 327.862.722.049 | 0,68 % |
| 2016 | 1.105.546.482 | 250.441.866.722 | 0,44 % |

Sumber : Seksi Penagihan, data diolah

Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa selama tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan, yaitu dari 0,93 % pada tahun 2014 menjadi 0,44 % pada tahun 2016. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 sampai 2016,

1. Rasio efektivitas penagihan dengan Surat Paksa mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai 2016. Berdasarkan indikator tingkat efektivitas, bahwa indikator yang menunjukkan < 69 % adalah tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur tidak efektif karena persentase di bawah 69 %.
2. Rasio kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa mengalami penurunan. Hasil perhitungan rasio kontribusi di atas menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa memberikan kontribusi yang cukup kecil terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab III, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur tergolong tidak efektif. Penyebabnya adalah pencairan piutang pajak setelah tindakan Surat Paksa tidak mencapai 100% karena penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, serta penanggung pajak mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya.
2. Rasio efektivitas penagihan dengan Surat Paksa mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai 2016. Berdasarkan indikator tingkat efektivitas, bahwa indikator yang menunjukkan $< 69\%$ adalah tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur tidak efektif karena persentase di bawah 69 %.
3. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya hasil perhitungan rasio kontribusi yang di bawah 1 %.. Rasio kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa juga mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai tahun 2016.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Menambah jumlah Pejabat Juru sita pajak.
3. Memperbaiki sistem administrasi perpajakan untuk mempermudah pengecekan data piutang pajak.

Diharapkan saran yang diberikan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sehingga pencairan piutang pajak dengan Surat Paksa mampu terlaksana dengan lebih optimal serta dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- , *Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000*
- Gulo, W. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Jogjakarta: Andi
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jogjakarta: UII Press
- R. Raco, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Rusdji, Muhammad. 2004. *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Indeks
- Santosa, Purbayu Budi dan Muliawan Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga
- Soemitro, Rochmad. 1996. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Jakarta: PT Eresco
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>